

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai studi empiris dari penelitian sebelumnya dan landasan teori yang menjadi dasar dari pokok permasalahan yang diamati. Studi empiris yang dibahas merupakan studi penelitian tentang indikator penyebab inflasi yang pernah dilakukan di Indonesia.

#### **2.1 Studi Empiris**

Dalam studinya Saraswati (2005), tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia, 1983.I – 2001.IV dengan pendekatan Koreksi Kesalahan dan Stok Penyangga Masa Depan menemukan bahwa dalam model koreksi kesalahan berdasarkan uji tanda koefisien regresi jangka pendek dan jangka panjang, variabel jumlah uang beredar mempunyai tanda positif untuk jangka pendek dan jangka panjang sedangkan variabel pendapatan riil dan tingkat bunga dalam mempengaruhi tingkat harga mempunyai tanda negatif. Apabila dilihat dari nilai tingkat signifikansinya, variabel jumlah uang beredar dan tingkat bunga berpengaruh dalam jangka panjang. Di sisi lain, variabel pendapatan riil hanya berpengaruh dalam jangka pendek.

Nopirin, dalam modelnya tentang inflasi, memasukkan variabel jumlah uang beredar, produk domestik bruto, tingkat inflasi yang diperkirakan/diharapkan, serta tingkat harga barang-barang impor sebagai faktor yang mempengaruhi inflasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat harga impor paling besar pengaruhnya terhadap laju inflasi di Indonesia. Hasil ini nampaknya sejalan dengan yang

diperoleh J. Soedrajad Djiwandono, bahwa inflasi domestik Indonesia selama periode 1968 – 1978 terutama dipengaruhi oleh inflasi dunia (76%), sedangkan sisanya disebabkan oleh kelebihan jumlah uang beredar (*excess supply of money*), (Gunawan, 1991 : 57).

Sementara penelitian Sjafii (2000), tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Yang Tidak Terantisipasi Terhadap Pertumbuhan Uang, Harga Dan Output Riil: Analisis pada saat Krisis Ekonomi Indonesia 1997–1999 menyatakan bahwa suku bunga deposito tertimbang yang mewakili dari suku bunga jangka pendek mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan moneter. Jika terjadi satu unit kenaikan pada suku bunga maka akan meningkatkan perubahan moneter sebesar 10 kali lipat. Jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter Indonesia mungkin perlu dibenahi, dengan mencoba jalur mekanisme transmisi suku bunga yang dikemukakan oleh Keynes.

## **2.2 Landasan Teori**

Teori yang akan dibahas terdiri dari pengertian inflasi, teori inflasi dan jenis inflasi. Selain itu juga akan dibahas tentang hubungan antara inflasi dengan variabel jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan suku bunga.

### **2.2.1 Pengertian Inflasi**

Dalam teori ekonomi cukup banyak definisi tentang inflasi. Pengertian inflasi menurut Nopirin adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Kenaikan tersebut mungkin

tidak terjadi bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya satu kali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah Indeks biaya hidup (*consumer price index*), Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*) dan GNP deflator (Nopirin, 1987: 25).

Perhitungan indeks biaya hidup dengan menggunakan biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Besarnya inflasi diperoleh dari besarnya persentase kenaikan indeks biaya hidup tersebut. Untuk mengukur laju kenaikan tingkat harga-harga umum atau inflasi, dapat digunakan rumus umum sebagai berikut :

$$I_t = \frac{HU_t - HU_{t-1}}{HU_{t-1}}$$

di mana :

$I_t$  : Tingkat inflasi pada periode (atau tahun) t

$Hu_t$  : Harga umum aktual pada periode t

$HU_{t-1}$  : Harga umum aktual pada periode t-1.

Indeks perdagangan besar mengukur laju inflasi dengan menggunakan sejumlah barang pada tingkat pedagang besar. Dengan demikian di dalam perhitungannya termasuk harga bahan mentah, harga bahan baku dan harga barang jadi.

Pengukuran inflasi dengan GNP deflator yaitu dengan perhitungan nilai barang dan jasa yang termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional bersih (GNP). GNP deflator diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan). Rumus menghitung GNP deflator adalah:

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP Riil}} \times 100$$

### 2.2.2 Teori Inflasi

Ada tiga teori yang mencakup aspek- aspek dari proses inflasi, tetapi bukan merupakan teori lengkap yang mencakup semua aspek penting dari proses inflasi ini. Dalam penerapannya ditentukan berdasarkan aspek-aspek mana yang pada kenyataannya penting di dalam proses inflasi di suatu negara, maka diperlukan teori mana (atau kombinasi teori mana) yang lebih tepat untuk diterapkan. Teori-teori ini adalah teori Kuantitas, teori Keynes dan teori Strukturalis.

#### 2.2.2.1 Teori Kuantitas

Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari (a) jumlah uang yang beredar, dan (b) psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga (*expectation*). Inti teori ini adalah sebagai berikut :

- (a) Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar baik dalam bentuk uang kartal atau uang giral. Tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar, kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan menyebabkan kenaikan harga-harga untuk sementara waktu. Bila

jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab awal dari kenaikan harga tersebut.

- (b) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan, yaitu : keadaan yang *pertama*, adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Dalam hal ini, sebagian besar dari penambahan jumlah uang beredar akan diterima oleh masyarakat untuk menambah likuiditasnya. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dari kenaikan jumlah uang tersebut tidak dibelanjakan untuk pembelian barang. Dengan demikian dampaknya terhadap kenaikan inflasi sangat kecil. Keadaan *kedua*, adalah apabila masyarakat mulai sadar bahwa ada inflasi. Masyarakat mulai mengharapkan kenaikan harga-harga. Penambahan jumlah uang yang beredar tidak lagi diterima oleh masyarakat untuk menambah kasnya, tetapi akan digunakan untuk membeli barang-barang. Bila masyarakat mengharapkan harga-harga untuk naik di masa mendatang sebesar laju inflasi di bulan-bulan yang lalu, maka kenaikan jumlah uang beredar sepenuhnya akan diartikan menjadi kenaikan permintaan akan barang-barang. Keadaan *ketiga* terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi. Dalam keadaan ini masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya terhadap nilai mata uang. Keadaan ini ditandai oleh makin cepatnya peredaran uang (*velocity of circulation*) yang mengalami kenaikan (Boediono, 2001: 167 - 169).

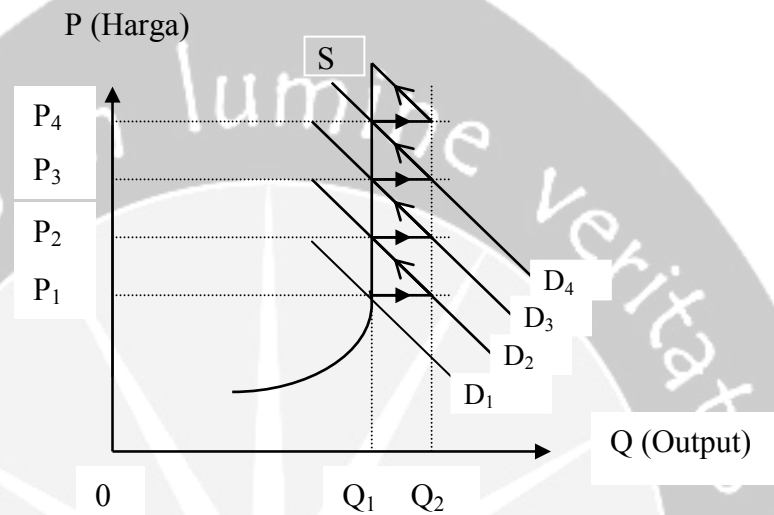
### 2.2.2.2 Teori Keynes

Teori Keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya. Menurut teori ini, inflasi dapat terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Inflasi terjadi diakibatkan karena adanya proses perebutan pembagian rejeki di antara kelompok-kelompok sosial (pelaku ekonomi) yang menginginkan untuk memperoleh bagian yang lebih besar dari yang dapat disediakan oleh masyarakat (perekonomian). Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Dengan didukung oleh kemampuan antar golongan dalam memperoleh dana untuk merubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang, maka akan cenderung mengakibatkan terjadinya *inflationary gap*. Golongan masyarakat itu mungkin saja pemerintah sendiri, yang menginginkan bagian yang lebih besar dengan jalan menjalankan defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru, mungkin juga pengusaha swasta yang pembiayaan dari kredit bank, golongan tersebut dapat juga berupa serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan upah melebihi kenaikan produktivitasnya.

Dengan adanya permintaan total pada harga yang berlaku melebihi jumlah yang dapat dihasilkan dalam perekonomian, maka akan cenderung mendorong kenaikan harga-harga (inflasi). Proses dari inflasi akan berhenti bila telah dicapai keadaan dimana permintaan efektif total tidak melebihi output total yang dihasilkan dalam perekonomian.

Proses inflasi karena *inflationary gap* dapat digambarkan seperti yang terlihat di bawah ini :

**Gambar 2.1**  
***Inflationary Gap***



Keterangan :

S : Kurva penawaran *aggregate*

D : Kurva permintaan *aggregate*.

Dengan menganggap bahwa semua golongan masyarakat dapat memperoleh dana yang cukup untuk membiayai rencana-rencana pembelian pada harga yang berlaku, maka dengan timbulnya *inflationary gap* (misalnya pemerintah memperbesar pengeluarannya dengan mencetak uang baru), kurva permintaan efektif akan bergeser dari  $D_1$  ke  $D_2$ . *Inflationary gap* terjadi sebesar  $Q_1Q_2$  dan harga naik dari  $P_1$  ke  $P_2$ . Kenaikan harga ini mengakibatkan rencana-rencana pembelian golongan masyarakat (termasuk pemerintah) tidak terpenuhi. Karena jumlah barang-barang yang tersedia tidak bisa lebih besar lagi daripada  $0Q_1$ , maka yang terjadi hanyalah realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan-golongan lain dalam masyarakat kepada sektor pemerintah.

Apabila pada periode berikutnya golongan-golongan masyarakat lain tersebut dapat memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya yang lama dengan harga-harga baru yang lebih tinggi, dan pemerintah tetap pula berusaha memperoleh jumlah barang-barang seperti yang direncanakan pada periode sebelumnya dengan harga-harga baru yang lebih tinggi (dan di sini perlu dicetak lagi uang baru), maka *inflationary gap* sebesar Q1 Q2 akan timbul lagi. Harga akan naik lagi dari P2 ke P3. Kalau setiap golongan masyarakat tetap berusaha memperoleh jumlah barang-barang yang sama dan mereka berhasil memperoleh dana untuk membiayai rencana - rencana tersebut pada tingkat harga yang berlaku, maka *inflationary gap* akan tetap timbul pada periode-periode selanjutnya. Apabila proses ini berlangsung terus maka yang terjadi hanyalah kenaikan harga-harga dan proses inflasi akan berhenti apabila sudah tidak ada lagi *inflationary gap*. Keadaan ini dapat tercapai apabila ada golongan yang tidak dapat lagi memperoleh dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya pada harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (Boediono, 2001: 169 - 172).

### **2.2.2.3 Teori Strukturalis**

Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi faktor-faktor ini bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang), maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang.



Menurut teori ini ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Ketegaran yang *pertama* berupa “ketidakelastian” dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena (a) Harga dipasar dunia dari barang-barang ekspor negara tersebut makin tidak menguntungkan (dibanding dengan harga barang-barang impor yang harus dibayar), atau sering disebut dengan istilah dasar tukar (*terms of trade*) yang makin memburuk. Sering dianggap bahwa harga barang-barang hasil alam, yang merupakan ekspor dari negara-negara sedang berkembang, dalam jangka panjang naik lebih lambat daripada harga barang-barang industri, yang merupakan impor oleh negara-negara sedang berkembang. (b) *Supply* atau produksi barang-barang ekspor yang tidak responsive terhadap kenaikan harga (*supply* barang-barang ekspor yang tidak elastis). Kelambanan pertumbuhan ekspor ini berarti kelambanan kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi maupun untuk investasi). Akibatnya, negara tersebut (yang berusaha, sesuai dengan rencana pembangunannya, untuk mencapai target pertumbuhan tertentu) terpaksa mengambil kebijaksanaan pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam negeri dari barang yang sebelumnya diimpor (*impor-substitution strategy*), meskipun seringkali produksi dalam negeri ini mempunyai ongkos produksi yang lebih tinggi daripada barang-barang sejenis yang diimpor. Ongkos produksi yang lebih tinggi mengakibatkan harga yang lebih tinggi. Kenaikan ongkos produksi akan mengakibatkan makin luas ke berbagai barang, sehingga makin banyak harga barang yang naik. Dengan demikian akan terjadi inflasi.

Ketegaran yang *kedua* berkaitan dengan “ketidakelastisan” dari *supply* bahan makanan di dalam negeri. Adanya ketidakseimbangan antara produksi bahan makanan dengan pertumbuhan penduduk akan mengakibatkan harga bahan makanan cenderung mengalami kenaikan melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Akibat selanjutnya adalah timbulnya tuntutan dari para karyawan (di sektor industri) untuk memperoleh kenaikan upah / gaji. Kenaikan upah berarti kenaikan biaya produksi, yang akan cenderung menaikkan harga barang tersebut. Kenaikan harga barang tersebut akan meluas pada sektor lain atau di sektor industri sendiri sehingga akan menimbulkan tuntutan kenaikan upah. Keadaan ini lama-kelamaan akan menimbulkan inflasi.

Proses inflasi yang timbul karena dua hal diatas dalam prakteknya tidak berdiri sendiri-sendiri. Umumnya kedua proses tersebut saling berkaitan dan seringkali memperkuat satu sama lain. Misalnya tidak biasanya produksi bahan makanan dalam negeri untuk mengikuti kenaikan kebutuhan di dalam negeri menimbulkan tekanan untuk mengimpor bahan makanan yang akan mengakibatkan neraca pembayaran mengalami keparahan yang akan mendorong penekanan proses substitusi impor yang berlebihan dan kenaikan harga barang-barang.

Mengenai teori strukturalis ada tiga hal yang perlu ditekankan yaitu :

- a. Teori ini menerangkan proses inflasi dalam jangka panjang yang sering terjadi di negara-negara sedang berkembang.
- b. Adanya asumsi eksplisit bahwa jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan kata lain proses inflasi tersebut dapat terus berlangsung apabila jumlah uang yang beredar terus bertambah.

- c. Tidak jarang faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai penyebab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa ketegaran tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan moneter pemerintah sendiri. Misalnya ketidakmampuan produksi pangan dalam negeri untuk tumbuh mungkin disebabkan oleh penekanan harga bahan makanan di dalam negeri sehingga produktifitas petani semakin menurun (Boediono, 2001: 173 – 176).

### **2.2.3 Jenis Inflasi**

Ada beberapa cara untuk menggolongkan inflasi dalam berbagai jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dibedakan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut :

#### **2.2.3.1 Jenis Inflasi Menurut Sifatnya**

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Inflasi dapat dibagi dalam tiga kategori berdasarkan besarnya laju inflasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Inflasi merayap (*creeping inflation*).

Biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya *double digit* atau bahkan *triple digit*) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga-

harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

c. Inflasi tinggi (*hyper inflation*)

Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang (Nopirin, 1987: 27).

### 2.2.3.2 Jenis Inflasi Menurut Sebabnya

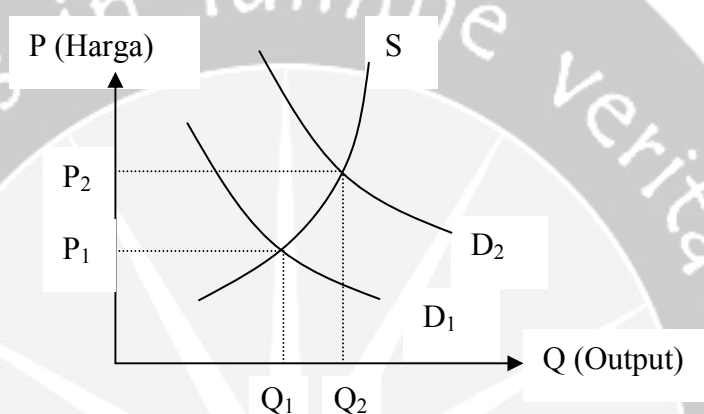
Inflasi yang timbul karena terdapat kelebihan permintaan masyarakat, sehingga terjadi penambahan jumlah uang beredar yang sering disebut dengan *Demand-pull Inflation*, sedangkan inflasi yang ditimbulkan karena kenaikan ongkos produksi sering disebut dengan *Cost-push Inflation*. Hal ini terjadi karena permintaan dan kenaikan ongkos produksi yang terus naik dan tidak diimbangi dengan penawaran (Boediono, 2001: 156).

a. *Demand Pull Inflation*

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi (output). Apabila kesempatan

kerja penuh (*full employment*) telah tercapai; penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan inflasi murni). Proses kenaikan harga sebagai akibat meningkatnya permintaan dapat digambarkan seperti di bawah ini :

**Gambar 2.2**  
***Demand Pull Inflation***



Keterangan :

S : Kurva penawaran *aggregate*

D : Kurva permintaan *aggregate*.

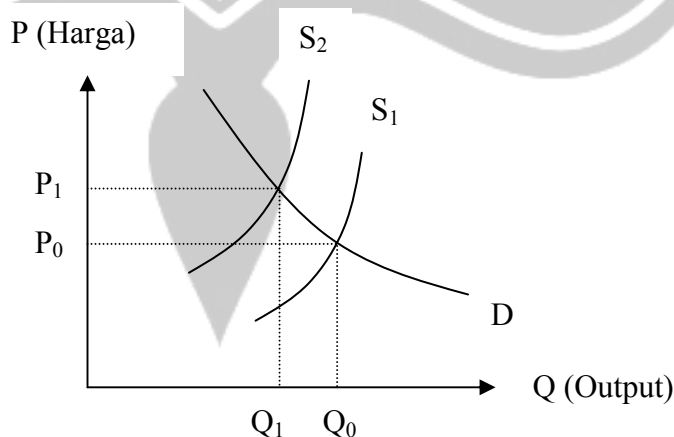
Gambar 2.2 menggambarkan suatu *demand inflation*. Karena permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah (misalnya, karena pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva *aggregate demand* bergeser dari  $D_1$  ke  $D_2$ . Akibatnya tingkat harga umum naik dari  $P_1$  ke  $P_2$ . Dalam *demand inflation*, biasanya ada kecenderungan untuk output (GDP riil) menaik bersama-sama dengan kenaikan harga umum. Besar kecilnya kenaikan output ini tergantung kepada elastisitas kurva *aggregate supply*, semakin mendekati output maksimum semakin

tidak elastis kurva ini. Kenaikan harga barang akhir (output) mendahului kenaikan harga barang-barang input dan harga-harga faktor produksi (upah dan sebagainya) (Boediono, 2001: 163-164).

b. *Cost Push Inflation*

Inflasi ini terjadi sebagai akibat dari kenaikan biaya untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Kenaikan biaya produksi dapat diakibatkan oleh naiknya harga BBM, naiknya tarif listrik (seperti yang baru saja terjadi yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan menaikkan tarif listrik), naiknya harga bahan baku, maupun kenaikan upah bagi karyawan. Sebagai akibat kenaikan biaya akan mendorong produsen untuk mengurangi jumlah barang yang ditawarkan agar tingkat keuntungan yang diharapkan dapat dipertahankan. Dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan sedangkan permintaan akan barang relatif tetap, maka akan cenderung mengakibatkan harga naik. Proses inflasi sebagai akibat dari penurunan jumlah barang yang ditawarkan dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**  
***Cost Push Inflation***



Keterangan :

S : Kurva penawaran

D : Kurva permintaan.

Karena ada kenaikan biaya produksi maka akan menggeser kurva S dari  $S_1$  ke  $S_2$ , output yang ditawarkan berkurang dari  $Q_0$  menjadi  $Q_1$ , dengan permintaan akan barang yang relatif tetap, sedangkan permintaan akan barang yang relatif tetap mengakibatkan terjadi kenaikan harga dari  $P_0$  ke  $P_1$  (Boediono, 2001: 163-164).

### 2.2.3.3 Jenis Inflasi Menurut Asal dari Inflasi

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*).

Inflasi dari dalam negeri terjadi karena adanya defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan akibat dari kenaikan pada biaya produksi barang dan jasa.

- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

Inflasi dari luar negeri ditimbulkan karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara-negara langganan perdagangan negara kita. Akibat dari kenaikan harga barang-barang yang kita impor akan mengakibatkan (1) secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor, (2) secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi (dan kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor (*cost inflation*), (3) secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan menaikinya pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*demand inflation*) (Boediono, 2001: 164 - 165).

## **2.2.4 Hubungan antara Inflasi dengan Variabel : Jumlah Uang Beredar, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga**

Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan suku bunga terhadap inflasi di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hubungan antara inflasi dengan variabel : jumlah uang beredar, produk domestik bruto dan suku bunga. Hubungan-hubungan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

### **2.2.4.1 Hubungan antara Inflasi dengan Jumlah Uang Beredar**

Definisi jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) atau *narrow money* adalah penjumlahan dari uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat. Uang kartal adalah uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral yang langsung di bawah kekuasaan masyarakat umum untuk digunakan. Uang kartal atau uang logam oleh pemerintah atau bank sentral yang di simpan dalam lemari besi bank-bank atau di bank sentral sendiri tidak termasuk “uang kartal”.

Uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening Koran (giro) yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum. Saldo ini merupakan bagian dari uang yang beredar karena sewaktu-waktu bisa digunakan oleh pemiliknya (masyarakat) untuk kebutuhannya (transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi), persis seperti uang kartal. Saldo rekening Koran (giro) milik suatu bank pada bank lain bukan uang giral.

Proses penciptaan uang beredar dapat didefinisikan dalam penjumlahan berikut :



$$M_1 = C + D$$

di mana :

C : *Currency* (uang kartal)

D : *Demand deposit* (uang giral).

Pengertian lain mengenai jumlah uang beredar didasarkan atas anggapan bahwa sebenarnya bukan hanya uang tunai dan saldo giro (cek) saja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Uang milik masyarakat yang disimpan di bank dalam bentuk deposito berjangka (*time deposit*) atau tabungan juga mempunyai ciri yang mendekati uang tunai. Deposito berjangka dapat diambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya meskipun dengan kehilangan bunga karena belum jatuh tempo untuk pengambilan.

Peran dari penciptaan uang sangat berpengaruh dalam kondisi perekonomian suatu negara. Pemerintah dalam menekan laju inflasi melalui kebijakan moneter sangat menitikberatkan pada pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara khusus definisi kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang.

Keputusan pemerintah dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, maka dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Usaha pemerintah dengan mempengaruhi jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang berlaku di pasar uang. Melalui tingkat bunga pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran investasi (I), selanjutnya permintaan agregat (AD), dan akhirnya tingkat harga (P) serta GDP

riil (Q). Dengan demikian apabila pemerintah melakukan pengendalian inflasi melalui jumlah uang beredar, maka laju inflasi dapat ditekan atau dikendalikan.

#### **2.2.4.2 Hubungan antara Inflasi dengan Produk Domestik Bruto**

Produk Domestik Bruto – PDB (*Gross Domestic Product – GDP*) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (*final*) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (*Mankiw, 2006: 6*). PDB mengukur nilai produksi yang terjadi sepanjang suatu interval waktu. Pada umumnya, interval tersebut adalah setahun atau satu kuartal (tiga bulan). Untuk mempelajari perubahan perekonomian seiring berlalunya waktu, ada dua ukuran PDB yaitu ; PDB nominal dan PDB riil. PDB nominal menggunakan harga saat ini untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian, sedangkan PDB riil menggunakan harga tahun pokok yang tetap untuk menentukan nilai produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Karena PDB riil tidak dipengaruhi perubahan harga, perubahan PDB riil hanya mencerminkan perubahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Jadi, PDB riil merupakan ukuran produksi barang dan jasa dalam perekonomian (*Mankiw, 2006: 15*).

Perhitungan PDB digunakan untuk mengukur sebaik apa kinerja keseluruhan perekonomian. Karena mengukur produksi barang dan jasa perekonomian, PDB riil mencerminkan kemampuan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang. PDB riil merupakan ukuran yang lebih baik dalam hal kesejahteraan daripada PDB nominal (*Mankiw, 2006: 16*). PDB nominal mencerminkan harga barang dan jasa maupun jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Kebalikannya, dengan membuat harga-harga tetap

pada tingkat tahun pokok, PDB riil hanya mencerminkan jumlah yang diproduksi. Selain kedua PDB tersebut, terdapat deflator PDB yang mencerminkan harga barang dan jasa namun bukan jumlah yang diproduksi. Deflator PDB adalah ukuran tingkat harga yang dihitung sebagai perbandingan PDB nominal terhadap PDB riil dikalikan 100. Deflator PDB mengukur tingkat harga-harga saat ini relatif terhadap tingkat harga-harga di tahun pokok dan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengamati rata-rata tingkat harga dalam perekonomian (Mankiw, 2006: 17).

Di sisi lain, untuk menghitung biaya hidup secara keseluruhan digunakan ukuran yang disebut Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks Harga Konsumen (*consumer price index – CPI*) merupakan suatu ukuran atas keseluruhan biaya pembelian barang dan jasa oleh rata-rata konsumen (Mankiw, 2006: 30).

Deflator PDB dan IHK digunakan untuk mengukur seberapa cepat peningkatan harga terjadi. Namun, ada dua perbedaan penting di antara keduanya. Perbedaan *pertama*, deflator PDB mencerminkan harga seluruh barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, sedangkan IHK mencerminkan harga seluruh barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Perbedaan ini menjadi sangat berarti ketika harga minyak mengalami perubahan. Ketika harga minyak naik, IHK akan naik lebih banyak daripada deflator PDB. Perbedaan *kedua*, terletak pada bagaimana harga yang bervariasi diberi bobot sehingga muncul sebuah angka untuk tingkat harga keseluruhan. IHK membandingkan harga pada sekeranjang barang dan jasa yang tetap terhadap harga sekeranjang barang dan jasa pada tahun pokok, sedangkan deflator PDB membandingkan harga barang dan jasa yang diproduksi saat ini terhadap harga barang dan jasa pada tahun pokok. Perbedaan ini tidaklah penting ketika seluruh harga berubah secara sebanding. Apabila harga barang dan jasa yang

berbeda berubah dengan jumlah yang beragam, maka pemberian bobot terhadap harga yang bervariasi ini dapat menjadi masalah untuk tingkat inflasi keseluruhan (Mankiw, 2006: 38).

#### **2.2.4.3 Hubungan antara Inflasi dengan Suku Bunga**

Keynesian berteori bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran uang atau jumlah uang beredar di pasar uang. Karena tingkat pengeluaran investasi swasta dipengaruhi oleh tingkat suku bunga maka otoritas moneter dapat mempengaruhi dan menstabilkan dalam jangka pendek, fluktuasi tingkat kegiatan ekonomi dengan memanipulasi jumlah uang beredar, yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga, kemudian pengeluaran investasi swasta dan akhirnya tingkat kegiatan ekonomi yang ditunjukkan oleh tingkat pendapatan dan output serta kesempatan kerja. Teori Keynesian menyatakan bahwa tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang.

Permintaan uang adalah hasrat para pemilik kekayaan memegang kekayaan dalam bentuk uang dan tidak dalam bentuk kekayaan finansial lain. Permintaan uang yang dikarenakan untuk spekulasi dan mempengaruhi harga dan hal tersebut dipengaruhi oleh suku bunga. Apabila suku bunga rendah, maka masyarakat cenderung memegang uang dan sebaliknya.

Penurunan suku bunga akan mengakibatkan kenaikan jumlah uang beredar. Hal ini akan mengakibatkan pada kenaikan permintaan uang sehingga menyebabkan harga-harga akan mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yaitu usaha pengendalian suku bunga dengan memanipulasi jumlah uang beredar bekerja terutama melalui pengaruhnya terhadap pengeluaran investasi juga akan mempengaruhi laju inflasi.

Arah perubahan kebijakan moneter dan fiskal biasanya dengan mudah dapat ditentukan. Dalam situasi resesi maka kebijakan yang tepat adalah kebijakan defisit APBN dan kebijakan uang longgar. Selain itu meskipun efek kebijakan moneter dan fiskal dapat dipisahkan namun kenyataan saling berhubungan dan dikoordinasi dengan baik. Pengaruh penurunan pajak akan diikuti oleh perubahan penawaran uang dan tingkat suku bunga. Misalnya pemerintah memperhitungkan penurunan pajak sebesar 0,5 triliun rupiah akan membawa perekonomian pada tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Namun tingkat suku bunga akan berubah bila perekonomian mengalami ekspansi akibat penurunan pajak. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan produksi dan pendapatan, maka permintaan akan uang naik dan dengan penawaran uang yang sedikit, maka akan menyebabkan tingkat suku bunga akan naik. Kenaikan suku bunga akan menurunkan atau mengurangi volume investasi swasta. Efek ekspansi dari pendapatan akibat penurunan pajak sebagian diimbangi oleh penurunan volume investasi akan mengakibatkan naiknya suku bunga. Efek ekspansi ini harus diimbangi dengan penawaran uang sehingga tingkat suku bunga tidak berubah.